

melintas tanpa teridentifikasi. Di negara tujuan, khususnya Inggris, korban justru diperlakukan sebagai pelaku kriminal, baik karena keterlibatan dalam budidaya ganja ilegal maupun pelanggaran keimigrasian. Di atas semua itu, lemahnya koordinasi lintas negara membuat informasi mengenai korban terputus setiap kali mereka berpindah yurisdiksi. Akumulasi kegagalan ini menutup seluruh saluran perlindungan domestik yang seharusnya tersedia, dan dalam perspektif TAN, kondisi inilah yang mendorong munculnya jaringan advokasi transnasional sebagai alternatif. Melalui mekanisme boomerang pattern, Pacific Links Foundation sebagai aktor lokal di Vietnam menyalurkan pengalaman korban kepada ECPAT UK dan Anti-Slavery International di tingkat internasional, yang kemudian mengangkatnya ke ruang kebijakan yang lebih luas dan mengembalikannya sebagai tekanan terhadap pemerintah yang gagal bertindak

Dimensi kedua dianalisis melalui empat strategi TAN yang dijalankan ECPAT UK dan Anti-Slavery International. Melalui *Information Politics*, kedua organisasi mengisi kekosongan pengetahuan yang selama ini membuat perdagangan manusia Vietnam-Eropa tidak terpetakan secara komprehensif. Penelitian *Precarious Journeys*, yang menggunakan kerangka End-to-End Vulnerability Mapping (EEVM) untuk menelusuri kerentanan korban dari hulu ke hilir, menghasilkan basis bukti yang kredibel dan lintas negara, sekaligus menegaskan bahwa kerentanan bukan karakteristik bawaan individu, melainkan produk dari kondisi struktural yang berkembang sepanjang perjalanan migrasi. Basis pengetahuan ini tidak berhenti pada satu publikasi, melainkan terus digunakan dan diperbarui dalam penelitian lanjutan, termasuk kolaborasi dengan Asylos mengenai risiko *re-trafficking* warga Vietnam.

Melalui *Symbolic Politics*, ECPAT UK dan Anti-Slavery International membingkai ulang cara perdagangan manusia Vietnam-Eropa dipahami oleh publik dan pembuat kebijakan. Kesaksian korban anak yang ditampilkan di halaman pertama *Precarious Journeys* berfungsi sebagai simbol yang memperlihatkan kontradiksi antara komitmen perlindungan korban yang diklaim negara dan kenyataan yang dialami korban di lapangan. Pembingkai ulang ini juga mencakup redefinisi cannabis cultivation dari tindak pidana menjadi indikator eksploitasi, serta penolakan terhadap narasi yang menyalahkan

kemiskinan sebagai satu-satunya penyebab perdagangan manusia. Tragedi Essex 39 pada Oktober 2019 memperkuat dimensi simbolis ini dengan mengubah perdagangan manusia Vietnam-Eropa dari isu yang tidak kasat mata menjadi persoalan kemanusiaan yang mendesak

Melalui *Leverage Politics*, kedua organisasi membangun pengaruh yang melampaui kapasitas mereka secara individual. Kolaborasi tiga pihak antara ECPAT UK, Anti-Slavery International, dan Pacific Links Foundation menciptakan jaringan yang menggabungkan akses lokal, kapasitas penelitian internasional, dan kredibilitas advokasi kebijakan. Penerimaan pendanaan dari UK Home Office Modern Slavery Innovation Fund menjadi leverage paradoks yang memperkuat legitimasi laporan sekaligus mempersulit penolakan pemerintah terhadap temuannya. Rezim hukum internasional, khususnya EU Directive 2011/36, Protokol Palermo, dan Modern Slavery Act, digunakan sebagai titik leverage material dan moral yang mengikat negara-negara target advokasi pada standar yang telah mereka sepakati sendiri

Melalui *Accountability Politics*, ECPAT UK dan Anti-Slavery International mendorong negara-negara untuk menutup jarak antara komitmen formal dan implementasi aktual. Dengan mendokumentasikan secara spesifik pasal-pasal mana dari instrumen hukum mana yang tidak diimplementasikan, termasuk non punishment provision terhadap anak korban perdagangan manusia yang terlibat dalam cannabis cultivation, laporan menciptakan tuntutan akuntabilitas yang konkret dan terukur. Temuan Fais bahwa angka rujukan NRM untuk warga Vietnam kembali meningkat dalam dua tahun terakhir setelah sempat menurun pasca-2019 menunjukkan bahwa *Accountability Politics* harus bersifat berkelanjutan, karena masalah struktural yang mendasari perdagangan manusia Vietnam-Eropa belum terselesaikan

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi ECPAT UK dan Anti-Slavery International sebagai jaringan advokasi transnasional tidak dapat dipahami melalui satu strategi tunggal atau satu intervensi kebijakan tertentu. Keempat strategi TAN yang mereka jalankan bekerja secara terintegrasi: *Information Politics* menyediakan basis faktual; *Symbolic Politics* menciptakan resonansi moral dan publik; *Leverage Politics* memperluas jangkauan tuntutan;

dan *Accountability Politics* memastikan bahwa tekanan terhadap negara bersifat spesifik, terukur, dan berkelanjutan. Bersama-sama, keempat strategi ini mencerminkan cara kerja TAN sebagaimana dijelaskan Keck dan Sikkink (1998): jaringan yang baik tidak hanya berupaya mengubah satu kebijakan, tetapi mengubah keseluruhan konteks informasi dan nilai yang digunakan oleh negara dalam merumuskan kebijakan terhadap korban perdagangan manusia.

6.2. Saran

6.2.1. Saran Akademik

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis mengenai efektivitas empat strategi TAN yang diidentifikasi dalam penelitian ini dengan menggunakan kerangka tahapan pengaruh jaringan (*stages of network influence*) yang juga dikemukakan Keck dan Sikkink (1998). Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa ECPAT UK dan ASI menjalankan keempat strategi tersebut, tetapi belum sepenuhnya mengukur sejauh mana setiap strategi berhasil mencapai perubahan pada level kebijakan (*policy change*) maupun perubahan perilaku negara (*behavioral change*). Studi lanjutan yang memfokuskan diri pada pelacakan perubahan kebijakan konkret yang dapat dikaitkan secara langsung dengan advokasi kedua organisasi ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman mengenai efektivitas TAN dalam isu perdagangan manusia.

Kedua, penelitian ini difokuskan pada kolaborasi ECPAT UK dan Anti Slavery International sebagai dua organisasi utama, dengan Pacific Links Foundation sebagai mitra lokal. Diperlukan penelitian lebih lanjut yang memperluas cakupan analisis ke aktor-aktor lain dalam jaringan advokasi perdagangan manusia Vietnam-Eropa yang lebih luas, termasuk Asylos,

organisasi masyarakat sipil di negara-negara transit seperti Polandia dan Republik Ceko, serta lembaga-lembaga Uni Eropa yang menerima rekomendasi dari laporan *Precarious Journeys*. Perluasan cakupan aktor ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur dan dinamika jaringan advokasi dalam isu ini.

Ketiga, penelitian ini dilaksanakan pada konteks di mana fokus kebijakan Eropa semakin bergeser ke arah kontrol migrasi dan keamanan perbatasan, sebuah tren yang diidentifikasi oleh Eleonora Fais sebagai tantangan utama bagi advokasi perlindungan korban. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana jaringan advokasi transnasional beradaptasi dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak kondusif bagi pendekatan berbasis hak asasi manusia, dan apakah adaptasi tersebut memerlukan pengembangan strategi baru di luar kerangka empat taktik TAN yang diidentifikasi Keck dan Sikkink (1998).

Keempat, kesenjangan penting yang belum terjawab dalam penelitian ini adalah perspektif korban sendiri mengenai efektivitas advokasi yang dilakukan ECPAT UK dan ASI. Penelitian selanjutnya yang mengintegrasikan suara korban secara lebih sistematis, bukan hanya sebagai sumber data dalam laporan, tetapi sebagai evaluator advokasi yang dilakukan atas nama mereka, akan memberikan dimensi analitis yang sangat berharga dan lebih berorientasi pada keadilan.

6.2.2. Saran Praktis

Pertama, bagi ECPAT UK dan Anti-Slavery International, temuan mengenai meningkatnya kembali angka rujukan NRM untuk warga Vietnam dalam dua tahun terakhir menunjukkan urgensi untuk memperbarui basis pengetahuan mengenai perdagangan manusia Vietnam-Eropa. Mengingat perubahan pola migrasi, jalur, dan bentuk eksploitasi yang terus berkembang, penelitian lanjutan yang memperbarui temuan *Precarious Journeys* (2019) sangat diperlukan agar advokasi yang dijalankan tetap berbasis pada realitas terkini yang dialami korban.

Kedua, bagi pemerintah Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan identifikasi korban perdagangan manusia asal Vietnam bukan semata persoalan kapasitas teknis, melainkan juga persoalan framing: selama migran Vietnam secara default dipandang sebagai

pelanggar imigrasi atau pelaku kriminal sebelum dipandang sebagai korban eksploitasi, mekanisme perlindungan formal apapun tidak akan berjalan dengan benar. Pemerintah perlu mengintegrasikan pelatihan wajib mengenai indikator perdagangan manusia dan non-punishment provision ke dalam prosedur standar aparat penegak hukum dan layanan imigrasi, dengan penekanan khusus pada kasus yang melibatkan anak-anak.

Ketiga, bagi organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara, termasuk jaringan ECPAT di kawasan, temuan penelitian ini menegaskan nilai strategis dari kolaborasi dengan mitra internasional yang memiliki akses terhadap ruang kebijakan di negara-negara tujuan. Pengalaman Pacific Links Foundation menunjukkan bahwa organisasi lokal yang membangun kepercayaan di komunitas asal korban memiliki aset yang tidak dapat digantikan oleh organisasi internasional manapun. Investasi dalam kemitraan yang saling menghormati antara organisasi lokal dan jaringan internasional perlu diperkuat sebagai strategi advokasi jangka panjang.

Keempat, bagi pemerintah Vietnam, temuan mengenai faktor-faktor struktural yang mendorong migrasi berisiko tinggi, termasuk tekanan ekonomi, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan keterbatasan akses terhadap jalur migrasi legal, mengisyaratkan bahwa upaya pencegahan perdagangan manusia yang benar harus beroperasi jauh sebelum warga negara memutuskan untuk bermigrasi. Penguatan program edukasi migrasi aman, regulasi agen perekrutan tenaga kerja, dan kerjasama bilateral dengan negara-negara transit dan tujuan merupakan langkah-langkah yang perlu diprioritaskan dan diperkuat komitmennya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU (BOOKS)

- Creswell, J. W. (2014). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th Edition). Pearson Education, Inc.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Cornell University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.
- Shelley, L. (2010). Human Trafficking. Cambridge University Press.

ARTIKEL JURNAL AKADEMIK (JOURNAL ARTICLES)

- Akee, R., Basu, A. K., Bedi, A., & Chau, N. H. (2014). Transnational trafficking, law enforcement, and victim protection: A middleman trafficker's perspective. *The Journal of Law and Economics*, 57(2), 349–386. <https://doi.org/10.1086/675404>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(Supplement 1 (S1)), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Davy, D. (2013). Measuring the Immeasurable: Understanding the Effectiveness of Anti-child Trafficking Transnational Advocacy